



POLEMIK PENATAAN PKL MALIOBORO Pansus DPRD Putuskan 19 Rekomendasi

YOGYA (KR) - Pansus Pengawasan Relokasi PKL Malioboro DPRD Kota Yogya memutuskan 19 butir rekomendasi. Pemkot Yogya pun desak untuk segera menindaklanjuti rekomendasi atas proses yang sempat menjadi polemik tersebut.

Menurut Ketua Pansus Antonius Fokki Ardianto, pansus itu dibentuk bukan untuk menolak kebijakan Pemda DIY melainkan guna menjembatani agar setiap prosesnya berjalan sesuai koridor. "Kami bekerja selama enam bulan dan hasilnya telah disampaikan secara resmi melalui sidang paripurna. Seluruh rekomendasi dari pansus itu harus ditindaklanjuti oleh Pemkot Yogya pada tahun ini," tandasnya, Senin (18/7).

Terdapat 19 butir rekomendasi yang diputuskan oleh pansus. Sebagian besar merupakan hasil pendalaman dan kajian atas berbagai masukan dan usulan dari komunitas Malioboro yang terdampak penataan PKL. Antara lain pendorong gerobak agar difasilitasi menjadi tenaga kebersihan di Teras Malioboro 1 atau Teras Malioboro 2. Begitu pula pangsang agar diperbolehkan kembali berjualan namun dengan jumlah terbatas serta terorganisir.

Selain itu, pansus juga menyoroti dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum pengurus paguyuban. Begitu pula adanya oknum yang memiliki lebih dari satu lapak. Atas dugaan tersebut Pemkot direkomendasikan untuk mengusut tuntas serta menindak jika terjadi pungli. "Semua rekomendasi harus dijalankan. Jika tidak, berarti tahun depan PKL kembali seperti semula yakni di area pedestrian," katanya.

Mengomentari hal tersebut, Penjabat (Pj) Walikota Yogya Sumadi SH MH, mengaku berterima kasih atas masukan yang direkomendasikan oleh pansus. Menurutnya Pemkot tentu akan menindaklanjuti setiap rekomendasi namun harus tetap disesuaikan dengan kemampuan. Seperti halnya keinginan pengasong serta pendorong gerobak agar difasilitasi masuk ke Teras Malioboro sebagai tenant, maka harus dipertimbangkan kapasitasnya.

"Kan tidak langsung seperti itu. Kita juga harus mempertimbangkan kenyamanan pengunjung. Yang jelas, mereka juga warga kota, pasti akan kita carikan solusi dan formasinya," terangnya.

(Dhi)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005